

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Umum

Merujuk pada hasil analisis terkait upaya Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam merehabilitasi penyandang disabilitas di BRTPD Pundong, kesimpulan penelitian ini ditarik berdasarkan indikator keberhasilan kebijakan menurut George C. Edwards III. Hal tersebut mencakup aspek komunikasi, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana (disposisi), serta tata kelola birokrasi sebagai berikut:

1. Aspek komunikasi dan proses komunikasi dalam menjalankan program rehabilitasi sosial di BRTPD Pundong secara menyeluruh telah terlaksana dengan efektif. Alur penyampaian kebijakan dari Dinas Sosial DIY ke unit pelaksana teknis sudah tertata melalui pedoman pelaksanaan, standar pelayanan yang jelas, serta agenda koordinasi yang rutin dilakukan. Kejelasan informasi mengenai tujuan program, kriteria sasaran, dan jenis layanan yang tersedia sangat membantu tim di lapangan dalam memahami arah kebijakan secara konkret. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih diperlukan penguatan komunikasi antar-sektor dan antar-profesi. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan layanan serta menyamakan persepsi mengenai kebutuhan spesifik tiap individu penyandang disabilitas yang sering kali berbeda satu sama lain.
2. Aspek sumber daya, dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta anggaran telah menjadi penyokong utama program rehabilitasi di BRTPD Pundong, meski pemanfaatannya belum mencapai titik maksimal. Peran pekerja sosial, tenaga pendamping, dan instruktur keterampilan menjadi elemen krusial dalam memastikan program berjalan secara intensif di lapangan. Selain itu, ketersediaan fasilitas pokok seperti sandang, pangan, dan papan telah menjadi fondasi kuat bagi pelaksanaan rehabilitasi berbasis institusi ini. Namun, tantangan nyata masih muncul dari terbatasnya jumlah personel serta variasi kompetensi yang ada. Hal ini menjadi hambatan serius mengingat tingginya

kompleksitas kebutuhan para penerima manfaat, sehingga pencapaian hasil rehabilitasi yang optimal dan berkelanjutan masih memerlukan upaya penguatan lebih lanjut.

3. Aspek disposisi, terkait aspek disposisi, para pelaksana kebijakan baik di tingkat instansi maupun di lingkup BRTPD Pundong secara umum telah menunjukkan pemahaman yang mendalam serta kesiapan penuh dalam menjalankan program. Komitmen ini selaras dengan misi utama rehabilitasi sosial, yaitu memulihkan keberfungsian sosial dan membangun kemandirian para penyandang disabilitas. Sikap responsif dan empati yang ditunjukkan petugas di lapangan menjadi faktor pendukung vital, terutama dalam proses pendampingan psikososial dan pembinaan mental. Namun, dalam dinamikanya, konsistensi serta motivasi kerja para pelaksana masih sangat bergantung pada kondisi beban kerja, ketersediaan sumber daya yang ada, serta dukungan kelembagaan yang bersifat jangka panjang.
4. Aspek struktur birokrasi. tata kelola birokrasi dalam program rehabilitasi di BRTPD Pundong telah terorganisasi dengan baik dan cukup suportif terhadap pelaksanaan kebijakan. Pembagian wewenang antara Dinas Sosial DIY sebagai regulator dan BRTPD Pundong sebagai unit pelaksana teknis sudah terdefinisi secara jelas melalui struktur organisasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Keberadaan SOP ini menjadi instrumen penting yang memberikan panduan teknis bagi petugas di lapangan. Kendati demikian, kerumitan birokrasi dan prosedur administrasi yang bersifat formal terkadang masih menghambat fleksibilitas layanan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri ketika tim harus menyesuaikan jenis intervensi dengan kebutuhan unik dan personal dari setiap penyandang disabilitas.
5. Kesimpulan menyeluruh secara garis besar, pelaksanaan program rehabilitasi sosial di BRTPD Pundong telah berjalan selaras dengan kerangka teori George C. Edwards III, walaupun hasilnya belum mencapai titik optimal. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterkaitan empat indikator utama: komunikasi yang transparan, dukungan sumber daya, komitmen (disposisi) pelaksana, serta struktur birokrasi yang tertata. Meski program ini terbukti

memberikan dampak positif bagi peningkatan keberfungsian sosial para penyandang disabilitas, masih diperlukan langkah penguatan pada aspek ketersediaan sumber daya, sinkronisasi koordinasi, serta fleksibilitas birokrasi. Langkah perbaikan tersebut krusial agar target rehabilitasi sosial dapat terwujud secara lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan, para peneliti telah mengembangkan beberapa strategi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak terkait, baik secara praktis maupun akademis.

5.2.1 Saran Praktis bagi Dinas Sosial DIY

Berdasarkan temuan di atas, peneliti merumuskan sejumlah strategi strategis yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata, baik dari sisi praktis maupun akademis. Bagi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, sangat disarankan untuk memberikan perhatian lebih pada peningkatan kuantitas sekaligus kualitas sumber daya manusia, terutama bagi tenaga pendamping dan teknis di panti rehabilitasi. Kapasitas aparatur perlu diperkuat melalui program pelatihan yang berkelanjutan dan spesifik agar pelayanan di lapangan bisa lebih adaptif terhadap kebutuhan unik para penyandang disabilitas. Di samping itu, penguatan alokasi anggaran serta efisiensi pemanfaatan dana menjadi kunci utama dalam menjamin jangkauan layanan yang lebih luas serta menjaga keberlangsungan program dalam jangka panjang.

5.2.2 Saran bagi Lembaga Terkait dan Pemerintah Daerah

Diharapkan pemerintah daerah, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota, dapat mempererat sinergi koordinasi dalam menjalankan program rehabilitasi sosial. Fokus utama perlu diarahkan pada sistem pemantauan dan pendampingan pasca-rehabilitasi yang berkelanjutan di tengah masyarakat. Peran aktif pemerintah di tingkat kabupaten hingga desa sangatlah krusial; tujuannya agar isu disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab pusat atau provinsi semata, melainkan mendapat perhatian nyata di lingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu, optimalisasi forum kolaborasi seperti Forum Penghormatan, Pelindungan, dan

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas harus terus didorong sebagai wadah strategis untuk menyatukan langkah antar pemangku kepentingan.

5.2.3 Saran untuk Masyarakat dan Organisasi Penyandang Disabilitas

Dukungan aktif dari masyarakat serta organisasi penyandang disabilitas sangat diperlukan demi kesuksesan program rehabilitasi ini. Hal ini dapat diwujudkan melalui partisipasi dalam pendampingan, advokasi kebijakan yang berpihak pada disabilitas, hingga upaya kolektif dalam meningkatkan kesadaran sosial. Perlu ditekankan bahwa lingkungan yang inklusif merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan berdaya setelah mereka kembali dari panti ke tengah masyarakat.

5.3 Agenda Penelitian Lanjutan

Penelitian ini menyadari adanya keterbatasan, baik dari sisi ruang lingkup maupun metodologi yang diterapkan. Oleh sebab itu, terdapat beberapa poin strategis yang dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya untuk memperkaya kajian di bidang ini.

1. Studi ke depan perlu memperdalam perspektif dari sisi penerima manfaat, yaitu penyandang disabilitas dan keluarga mereka. Melibatkan suara mereka secara komprehensif akan memberikan gambaran nyata mengenai tantangan dalam proses rehabilitasi serta keberhasilan reintegrasi sosial mereka di masyarakat. Hal ini krusial untuk mengukur dampak jangka panjang program secara lebih utuh.
2. Diperlukan evaluasi yang lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan komparatif. Peneliti selanjutnya bisa membandingkan efektivitas program di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dengan model rehabilitasi di daerah lain. Melalui studi perbandingan ini, diharapkan muncul rekomendasi yang lebih tajam dan berbasis pada praktik terbaik (best practices) yang telah teruji.
3. Penting untuk mengeksplorasi sejauh mana kolaborasi lintas sektor berperan dalam keberhasilan kebijakan ini. Analisis mengenai jejaring kerja antara pemerintah, sektor swasta, organisasi disabilitas, dan masyarakat luas

sangat dibutuhkan untuk memecahkan kerumitan isu layanan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui pengembangan agenda penelitian tersebut, diharapkan kajian mengenai implementasi program rehabilitasi tidak lagi sekadar bersifat deskriptif. Lebih dari itu, studi mendatang diharapkan mampu memberikan sumbangsih teoretis dan praktis yang lebih kuat dalam menciptakan kebijakan sosial yang lebih adil bagi penyandang disabilitas.

